



RANCANGAN AKHIR

Rencana Kerja

Tahun 2024



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

RANCANGAN AKHIR
Rencana Kerja
Tahun 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan kewajiban bagi setiap satuan unit kerja (Perangkat Daerah) sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

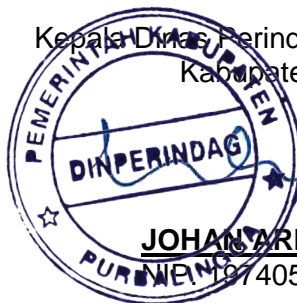
Rencana Kerja (RENJA) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Purbalingga,

2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga



JOHANNARIFIN, S.Sos. M.Si

19740520 199803 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	32
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perindustrian	32
3.1.3. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perdagangan	33
3.2. Tujuan dan Sasaran	33
3.2.1. Tujuan	33
3.2.2. Sasaran	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP	48



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



[Handwritten Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



[Handwritten Signature]
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.


BUPATI PURBALINGGA,
[Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
[Signature]
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Industri, dan Perdagangan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 yaitu **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif)

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga melaksanakan 2 urusan pilihan yaitu urusan pilihan bidang perindustrian dan urusan pilihan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan dua urusan tersebut pelaksanaannya di tahun 2022 dibagi menjadi 8 program, 18 kegiatan dan 32 subkegiatan. Secara keseluruhan capaian fisik program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mencapai 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97,49%.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian;
2. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD
Dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2022
Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 doc	-	2 doc	2 doc	100	2 doc	2 doc	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP,	5 doc	-	5 doc	5 doc	100	5 doc	5 doc	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	67 ASN	-	67 ASN	67 ASN	100	67 ASN	67 ASN	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	80 kl	-	80 kl	80 kl	100	80 kl	80 kl	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarpras kantor	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		AC, PC, Printer								
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	1 pkt	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	1 pkt	100
B	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
B1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
II	PROGRAM PERIZINAN dan PENDAFTARAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	PERUSAHAAN Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan									
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
8	Penerbitan Tanda Daftar Gudang									
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	2 pkt	-	2 pkt	2 pkt	100	2 pkt	2 pkt	100
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	21 pasar	-	21 pasar	21 pasar	100	21 pasar	21 pasar	100
10	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi PKL PFC dan CKC	2 pkt		2 pkt	2 pkt	100	2 pkt	2 pkt	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK dan BARANG PENTING									
11	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	12 bln		12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Pasar Murah	5 lokasi		5 lokasi	5 lokasi	100	5 lokasi	5 lokasi	100
12	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	Jumlah pemantauan	52 kl		52 kl	52 kl	100	52 kl	52 kl	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	harga dan stok barang kebutuhan pokok								
13	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	12 kl		12 kl	12 kl	100	12 kl	12 kl	100
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
14	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan ekspor	40 org		40 org	40 org	100	40 org	40 org	100
	Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan pada pameran nasional	1 kl		1 kl	1 kl	100	1 kl	1 kl	100
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
15	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terselenggaranya tera dan teraulang UTPP	12 bln		12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
C1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
VII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
16	INDUSTRI									
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Raperda RPIK	1 doc		1 doc	1 doc	100	1 doc	1 doc	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		12 bln		12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Operasional UPTD Logam; Pengembangan sarpras UPTD logam (DAK)	12 bln		12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal	640; 50; 10 paket; unit; unit		640; 50; 10 paket; unit; unit	640; 50; 10 paket; unit; unit	100	640; 50; 10 paket; unit; unit	640; 50; 10 paket; unit; unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA									
17	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan IUI	12 kl		12 kl	12 kl	100	12 kl	12 kl	100
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
18	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	Tersusunnya database	1 doc		1 doc	1 doc	100	1 doc	1 doc	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	industri								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinperindag Tahun 2022
Kabupaten Purbalingga

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,5	3,76
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	7.520.557	8.018.180
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4	3,91
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	3.335.863	3.620.500
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	67,97	72,41
Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja						
Capaian Indikator Kinerja : Sangat Tinggi						

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikut ini isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi OPD

- a. Program Pengentasan Kemiskinan
- b. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok
- c. Biaya Produksi KUKM mengalami kenaikan yang berakibat pada turut naiknya harga produk KUKM Kabupaten Purbalingga
- d. Daya Beli Masyarakat yang menurun berimbas pada keuntungan yang didapat.
- e. Terbatasnya modal;
- f. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah;
- g. Kemampuan pemasaran yang terbatas;
- h. Akses informasi usaha rendah;
- i. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKMK, Usaha Besar dan BUMN);
- j. Kelembagaan yang belum tertata;

2.3.1. Rekomendasi Catatan Strategis.

1. Pertumbuhan KUKM memberi andil dalam penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.
2. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan kalau perlu dilakukan Operasi Pasar.
3. Penggunaan teknologi tepat guna dan peralihan peralatan bagi UKM yang masih menggunakan alat ber Bahan Bakar Minyak diganti dengan peralatan menggunakan daya listrik

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas Dinperindag Kabupaten Purbalingga menjalankan misi ke 5 **“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”**

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.868.351.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.868.351.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100% 100% 82 Angka 100%	8.312.221.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100% 100% 82 Angka 100%	8.312.221.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100%	9.910.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100%	9.910.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 doc	5.407.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 doc	5.407.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	7 doc	4.503.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	7 doc	4.503.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.538.446.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.538.446.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	67 ASN	7.378.455.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	67 ASN	7.378.455.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam); Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	30 OK; 80 OK	53.831.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam); Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	30 OK; 80 OK	53.831.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinperindag	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil	12 bln	106.160.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Dinperindag	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil	12 bln	106.160.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
			pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			si Keuangan SKPD		pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.000.000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	Honorarium pejabat pengelola barang, dan pejabat barang/jasa	12 bln	7.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	Honorarium pejabat pengelola barang, dan pejabat barang/jasa	12 bln	7.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	82.619.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	82.619.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperindag	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	5.309.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperindag	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	5.309.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperindag	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	47.660.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperindag	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	47.660.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinperindag	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bln	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinperindag	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bln	2.400.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinperindag	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	24 kl	19.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinperindag	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	24 kl	19.250.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
11	SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	Honorarium Operator SIM	12 bln	8.000.000	SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	Honorarium Operator SIM	12 bln	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	539.132.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	539.132.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	Tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	Tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	3.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindag	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	77.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindag	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	77.400.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperindag	Tersedianya Honor Operator Komputer, Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 bln	458.232.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperindag	Tersedianya Honor Operator Komputer, Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 bln	458.232.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		135.114.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		135.114.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Dinperindag	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bln	115.664.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Dinperindag	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bln	115.664.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		(ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		(ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bln	19.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bln	19.450.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	27.087.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	27.087.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	13.583.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	13.583.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	12 bln	13.583.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	12 bln	13.583.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	13.504.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	13.504.000	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	12 bln	13.504.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	12 bln	13.504.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	5.121.496.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	5.121.496.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	5.003.371.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	5.003.371.000	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	2 pkt	1.882.808.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	2 pkt	1.882.808.000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	21 pasar	3.120.563.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	21 pasar	3.120.563.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	118.125.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	118.125.000	
1	Pembinaan dan	Kab.	Fasilitasi PKL PFC	2 pkt	118.125.000	Pembinaan dan	Kab.	Fasilitasi PKL PFC	2 pkt	118.125.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Purbalingga	dan CKC			Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Purbalingga	dan CKC			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	89.923.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	89.923.000	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;	100%	32.878.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;	100%	32.878.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	12 bln	32.878.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	12 bln	32.878.000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	32.519.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	32.519.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	32.519.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	32.519.000	
2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	24.526.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	24.526.000	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	12 kali	24.526.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	12 kali	24.526.000	
1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Purbalingga	persentase pasar tertib ukur	15%	317.624.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Purbalingga	persentase pasar tertib ukur	15%	317.624.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Terselenggarannya tera dan terulang UTPP	12 bln	317.624.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Terselenggarannya tera dan terulang UTPP	12 bln	317.624.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Purbalingga	kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	1.226.139.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Purbalingga	kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	1.226.139.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	1.226.139.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	1.226.139.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	Pembinaan IKM rokok	1 kel	406.624.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	Pembinaan IKM rokok	1 kel	406.624.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	Operasional UPTD Logam 12 bulan Pengembangan sarpras UPTD logam (DAK)	12 bln	372.762.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	Operasional UPTD Logam 12 bulan Pengembangan sarpras UPTD logam (DAK)	12 bln	372.762.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal;	640 paket; 50 unit; 10 unit;	446.753.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal;	640 paket; 50 unit; 10 unit;	446.753.000	
	TOTAL				12.909.388.000					12.909.388.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perindustrian

a. Arah Pembangunan Industri

Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, Perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

1. Pembangunan 13 kawasan industri di luar Jawa melalui fasilitasi pemerintah dan swasta;
2. Redesain road map industrialisasi sejalan dengan trisaksti dan Nawa Cita melalui penetapan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional;
3. Hilirisasi hasil tambang ke produk jasa industri;
4. Hilirisasi produk produk pertanian menjadi produk agro industri;
5. Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk produk industri;
6. Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri;
7. Peningkatan pendidikan dan *skill* tenaga kerja industri;
8. Fasilitasi terhadap industri dalam negeri;
9. Penurunan impor;

10. Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu, industri *intermediate* dan industri hilir;

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perdagangan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan perdagangan dalam negeri, antara lain pengembangan perdagangan daerah, memperlancar distribusi bahan pokok, memperbaiki sarana dan prasarana distribusi perdagangan (pembangunan/revitalisasi pasar rakyat/pasar tradisional), serta program perlindungan konsumen, antara lain pemberdayaan dan perlindungan konsumen, serta peningkatan pengawasan barang beredar. Arah Kebijakan Nasional dibidang perdagangan antara lain

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional;
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;
4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional;
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen;
7. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi & Logistik;
8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya kinerja sektor perindustrian dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan;

3.2.2. Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya saing sektor perindustrian dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku;
2. Peningkatan daya saing sektor perdagangan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB);
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP DINPERINDAG

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga rencana di Tahun 2024 akan merencanakan 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 12.853.344.000,00 dan di tahun 2025 sebesar Rp. 14.917.214.000,00 adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

7. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

9. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
10. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

IV. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

11. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
12. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
13. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

V. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

14. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Citra Produk Ekspor

VI. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

15. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

16. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

17. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

18. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
I.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	Kab. Purbalingga	80 unit	4.996.000		80 unit	28.000.000	
a.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	Kab. Purbalingga	80 unit	4.996.000		80 unit	14.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	1 dok	4.996.000		1 dok	14.000.000	
b.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	jumlah usaha perdagangan yang	Kab. Purbalingga	80 unit	4.996.000		80 unit	14.000.000	

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	terfasilitasi perijinan Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	1 dok	4.996.000			1 dok	14.000.000
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	Kab. Purbalingga	10 unit	3.550.690.000			10 unit	5.100.000.000
a.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	Kab. Purbalingga	10 unit	3.486.521.000			10 unit	5.000.000.000
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	1 unit	166.500.000			1 unit	1.500.000.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	21 unit	3.320.021.000			21 unit	3.500.000.000
b.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	Kab. Purbalingga	10 unit	64.169.000			10 unit	100.000.000
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	1 dok	64.169.000			1 dok	100.000.000
III.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	Kab. Purbalingga	100%	167.047.000			100%	182.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
a.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;	Kab. Purbalingga	100%	146.568.000			100%	155.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	12 Lap	11.288.000			12 Lap	15.000.000
3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	1 Lap	135.280.000			1 Lap	140.000.000
b.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	Kab. Purbalingga	100%	14.485.000			100%	19.000.000
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Kab. Purbalingga	12 Lap	14.485.000			12 Lap	19.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
c.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	Kab. Purbalingga	100%	5.994.000			100%	8.000.000
2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	12 Lap	5.994.000			12 Lap	8.000.000
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	Kab. Purbalingga	40 org	39.960.000			40 org	50.000.000
a.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	Kab. Purbalingga	40 org	39.960.000			40 org	50.000.000
1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kab. Purbalingga	40 pelaku	39.960.000			40 pelaku	50.000.000
V.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase pasar tertib ukur	Kab. Purbalingga	15%	284.412.000			15%	285.000.000
a.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	persentase pasar tertib ukur	Kab. Purbalingga	15%	284.412.000			15%	285.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Purbalingga	2200 unit	284.412.000			2200 unit	285.000.000
VI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	kawasan/klaster industri yang terbangun	Kab. Purbalingga	4 unit	701.062.000			4 unit	1.219.515.000
a.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	kawasan/klaster industri yang terbangun	Kab. Purbalingga	4 unit	701.062.000			4 unit	1.219.515.000
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	1 doc	189.323.000			1 doc	400.000.000
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	1 doc	372.762.000			1 doc	372.762.000
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	1 doc	138.977.000			1 doc	446.753.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi	Kab. Purbalingga	100%	4.000.000			100%	5.000.000
a.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi	Kab. Purbalingga	100%	4.000.000			100%	5.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Purbalingga	1 dok	4.000.000			1 dok	5.000.000
VIII.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	cakupan industri yang terdata dalam SIINAS	Kab. Purbalingga	80%	4.000.000			80%	5.000.000
a.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan industri yang terdata dalam SIINAS	Kab. Purbalingga	80%	4.000.000			80%	5.000.000
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	Kab. Purbalingga	1 doc	4.000.000			1 doc	5.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
IX.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Kab. Purbalingga	100% 100% 82 Angka 100%	8.092.181.000			100% 100% 82 Angka 100%	8.042.699.000
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	Dinperindag	100%	3.300.000			100%	11.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	1 doc	1.800.000			1 doc	6.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dinperindag	5 lap	1.500.000			5 lap	5.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	7.227.053.000			100%	7.110.673.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	64 org/bln	7.137.062.000			64 ASN	6.992.374.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	1 Dok	54.640.000			1 Dok	73.299.000
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinperindag	1 dok	35.351.000			1 dok	45.000.000
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	2.331.000			100%	7.000.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	1 lap	2.331.000			1 kap	7.000.000
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	4.000.000			100%	5.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Dinperindag	2 Org	4.000.000			2 Org	5.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	36.108.000			83.894.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Paket	1.332.000			5.309.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Paket	24.652.000			50.660.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinperindag	1 Dok	800.000			799.200	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperindag	1 Lap	6.660.000			10.000.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	1 Dok	2.664.000			7.200.000	
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan	Dinperindag	100%	701.961.000			539.132.000	

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Anggaran yang ditindaklanjuti							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	1 Lap	1.165.000			1 Lap 3.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinperindag	1 Lap	242.564.000			1 Lap 77.400.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Lap	458.232.000			1 Lap 458.232.000	
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag		117.428.000			291.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinperindag	41 unit	110.768.000			41 unit 116.000.000	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinperindag	20 unit	6.660.000			20 unit 25.000.000	
	TOTAL				12.853.344.000			14.917.214.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Purbalingga, 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga


JOHAN ARIFIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19740520 199803 1 004